

Kapolda Sumut Irjen Pol Nurudin Usman:

SAYA INGIN MEDAN NYAMAN BAGI SETIAP ORANG

Angka tindak kejahatan di Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang signifikan. Kota yang dulu di zaman premanisme berkembang subur terkenal dengan julukan "Ini Medan Bung" kemudian disulap menjadi "Ini baru Medan" oleh Kapolda Irjen Bambang Hendarso Danuri (sekarang Kabareskrim, Red), kini berganti julukan lagi menjadi "Medan kini Nyaman Bung".

Perubahan itu tentu tidak lepas dari kemauan dan keseriusan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam memerangi berbagai aksi kejahatan. Terciptanya keamanan tentu juga tidak lepas dari bagaimana strategi yang diterapkan Kapolda Sumut dalam membangun kerja sama dengan seluruh masyarakat guna memerangi berbagai kejahatan.

Bagaimana strategi serta program ke depan Polda Sumut dalam menggalang kekuatan, memerangi maupun menanggulangi kejahatan di Sumatera Utara untuk menciptakan "Medan Nyaman", baru-baru ini wartawan Jagratara, Cecilia E Murwani mewawancarai Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Nurudin Usman. Inilah kutipannya.

Umumnya, setiap pejabat baru mengusung program baru pula. Bapak bagaimana?

Begini ya, ini kan program pejabat lama yang sudah disusun dalam satu tahun. Jadi, otomatis yang saya laksanakan sekarang ini tentu masih melanjutkan program pejabat lama yang harus berjalan hingga 2007 nanti. Perlu digaris bawahi bahwa program kita itu berjalan tidak terlepas dengan anggaran. Anggaran kita juga selalu berbasis kinerja, sehingga apa yang sudah disusun oleh Pak Bambang dalam satu tahun ini akan saya jalankan. Artinya, Pak Bambang yang susun programnya, saya yang melaksanakannya karena pergantian terjadi pas pada akhir tahun Desember. Jadi kita tidak bisa keluar dari program yang sudah disusun itu. Soalnya, semua program itu ada

dananya dan kaitannya nanti adalah daya serap. Jadi, kalau umpamanya ada hal-hal yang keluar dari program itu, saya harus melaporkannya ke atas, tidak bisa seandainya.

Berkaitan dengan penegakan hukum. Strategi apa yang Bapak terapkan?

Ada dua strategi penegakan hukum yang saya jalankan. Yang pertama, strategi ke dalam dan yang kedua strategi ke luar. Strategi ke dalam ya, saya mengkonsolidasikan semua kekuatan dengan kekuatan personil maupun kemampuan personil. Yang dimaksud dengan kekuatan personil itu nantinya juga berkaitan dengan sejauh mana lapis-lapis kemampuan yang ada.

Contohnya?

Misalnya, apabila Polsek tidak mampu menangani sebuah kasus langsung di backup oleh Polres. Kemudian kalau Polres tidak mampu menangani kasus seperti korupsi atau teror juga kita backup. Jadi, itu yang disebut dengan lapis-lapis kemampuan. Nah demikian juga dengan Polda. Kalau tidak mampu menangani ya langsung minta bantuan ke Mabes Polri.

Kemudian kalau strategi ke luar?

Seperti yang sudah jadi kebijakan bapak Kapolri, yang pertama per polisian masyarakat. yang kita kedepankan. Itu yang pertama. Kedua, adalah pencegahan dan ketiga mengedepankan penindakan hukum dalam rangka pencegahan. Itu strategi saya.

Kapan strategi itu diberlakukan?

Sudah dimulai sejak saya datang. Kepada seluruh jajaran kepolisian Polda Sumut sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mentolelir setiap pelanggaran apapun juga. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas. Juga apabila ada keterlibatan anggota langsung kita proses sesuai ketentuan yang berlaku. Pokoknya kita tindak tegas. Tak akan kita tolelir lagi. Misalnya dia melakukan pelanggaran disiplin langsung kita tindak dengan peradilan disiplin. Kalau dia melakukan pelanggaran pelanggaran profesi, ya kita tindak dengan peradilan profesi. Kalau dia melakukan tindak pidana kita se-



rahkan dia ke peradilan pidana. Jadi bagi anggota saya pesankan jangan main-main dengan hukum. Hal itu sudah saya sampaikan setiap saya memberikan arahan kepada para Kasatwil. Begitu pun yang dilakukan oleh masyarakat, kita perlakukan sama. Baik individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran akan kita tindak tanpa pandang bulu.

Tadi Bapak berbicara soal dana anggaran. Bagaimana menurut Bapak?

Kalau melihat dana anggaran sih, pada umumnya belum memadai. Dan ini pada umumnya sama-sama dirasakan oleh Polda lain. Tapi meski demikian kita tetap mengop-

timalkan semua dana anggaran yang sudah ada. Memang, kalau melihat angkanya jumlahnya kan besar untuk kita. Tetapi itu kan untuk gaji. Dan anggaran untuk gaji anggota memang sangat besar. Sementara dana untuk operasional belum memadai.

Tempat tugas baru pasti suasana baru. Apa yang Bapak rasakan berada di sini?

Memang pasti ada perbedaan ya? Pertama kultur budaya, karakteris masyarakat pasti berbeda-lah. Kemudian dari budaya itu sendiri. Kita melihat kejahatan itu merupakan hasil produk masyarakat ya? Tentunya kejahatan di sini juga berbeda jauh ketika saya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat.

Kalau di sini intensitas dan kualitasnya tinggi sekali. Misalnya, kalau di Kalimantan Barat jarang orang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api, di sini ada. Yang jelas, dimana pun setiap daerah memiliki karakteristik kejahatan yang berbeda pula.

Lalu, langkah apa yang akan Bapak lakukan?

Berkaitan dengan hal itu tentu diharapkan kesungguhan dan keseriusan anggota. Anggota diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh ketentuan. Tetapi juga, polisi ini tidak bisa bekerja sendiri. Nah, harus ada bantuan dari masyarakat juga. Bantuan masyarakat ini sangat diharapkan dan ini sudah



saya rasakan. Sudah dibuktikan oleh masyarakat Medan. Seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Irawan Dahlan (mantan Kapoltabes, Red). Pak Irawan ini berhasil menggalang kepedulian masyarakat. Jujur saya akui dia berhasil dengan baik. Keberhasilan itu seperti saya garis bawahi tadi bukan hanya perjuangan bersama rekan sejawat Irawan Dahlan, tetapi juga berkat bantuan masyarakat Medan. Untuk itu kuncinya adalah masyarakat. Bagaimana kita melakukan penanggulangan kejahatan dengan tuntas harus melibatkan semua komponen masyarakat. Pribahasanya, kalau mengangkat meja sendiri tidak akan terangkat, tetapi kalau diangkat bersama-sama akan mudah kita lakukan. Demikian juga dengan kejahatan, kalau kita sama-sama tanggulangi, akan mudah menanganinya, begitu kan?

Menyusul penembakan di Semarang, seluruh jajaran Polda harus melakukan uji kepemilikan

senjata. Bagaimana disini?

Langkah pertama yang dilakukan tentu bagaimana memperketat pemberian izin senjata api. Kemudian pelan-pelan kita sudah mulai melakukan tes ujian kemampuan menembak bagi anggota. Tes kemampuan menembak itu diberlakukan kepada seluruh jajaran kepolisian Polda Sumut. Walaupun sudah lulus persyaratan standar, lulus psikotesnya, lulus tes kemampuan menembaknya, setiap anggota tetap akan kita uji kembali.

Ada tes tambahan selain psikotes dan uji kemampuan menembak?

Disamping itu, tentu saja uji temperamental. Persyaratan ini sangat dibutuhkan. Maka berkaitan dengan hal itu, seluruh Kasatwil sudah saya berikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan temperamental bagi anggotanya. Bisa saja semua persyaratan terpenuhi, kemampuan menembak hebat, tapi kalau punya watak temperamental tidak akan diperbolehkan memem-

gang senjata.

Sejauh ini, sudah berapa banyak senjata yang disita oleh Polda Sumut?

Saya rasa sudah sangat banyak. Kalau ingin lebih rinci, datanya ada pada Kabid Propam. Silahkan diminta saja nanti ke sana ya. Yang jelas, setiap hari Kamis juga kita melakukan pengecekan senjata, kelengkapan surat-suratnya, perawatan dan kebersihan senjatanya serta jumlah pelurunya. Sementara ini yang boleh memegang senjata hanya anggota yang di operasional saja.

Untuk menangani kondisi kejiwaan anggota, apakah Polda memiliki biro khusus?

Ya, tentu saja kita punya. Namanya Kasubag Psikologi. Kita selalu memanfaatkan itu setiap saat. Walaupun ada arahan dari Kapolri, apabila memang tenaga psikologi itu kurang kita bisa minta bantuan dari instansi lain. Tenaga psikologi yang kita miliki memang tidak banyak, tetapi kita bisa bekerja sama dengan instansi lain. Yang pasti kehadiran biro itu sangat bermanfaat bagi kita. Tidak saja terbatas menangani anggota-anggota yang bertugas tapi juga bermanfaat bagi para keluarga anggota yang memerlukan.

Terakhir, apa sih obsesi Bapak ke depan?

Keinginan saya ya itu tadi. Pak Bambang kan sudah mengubah istilah "Ini Medan Bung" menjadi "Ini Baru Medan". Nah obsesi saya juga tak jauh dari itu. Saya ingin membawa Medan ini menjadi kota yang aman dan nyaman. Sebetulnya ini bukan obsesi, tetapi sebuah keinginan yang pasti juga menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat Medan. Cukup?

Operasi Peredaran Rokok Ilegal

MENANTI KESERIOUSAN APARAT

KUANGAN negara berpotensi hilang sebesar Rp 5,25 triliun per tahun hanya dari peredaran rokok ilegal. Potensi kehilangan keuangan ini sebenarnya bisa ditekan jika aparat kepolisian bersama Bea dan Cukai lebih serius melakukan upaya pemberantasan.

Apalagi, peta peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah sudah diketahui. Bukan hanya itu, prakiraan jumlah peredaran dan pintu masuk ke setiap provinsi juga sudah ada. Semuanya tinggal menunggu keseriusan dari aparat keamanan.

Rokok ilegal adalah rokok yang tidak menggunakan pita cukai, menggunakan cukai palsu dan menggunakan cukai yang bukan peruntukannya.

Desakan itu disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Rakyat Makassar, Muslimin, saat menyampaikan masukan ke Mabes Polri, belum lama ini.

Menurut Muslimin, pajak dari cukai yang seharusnya dibayar pabrik rokok berskala kecil dan menengah mencapai Rp 6,07 triliun per tahun. Namun pajak dari cukai yang masuk ke kas negara hanya Rp 816,25 juta.

Dalam menjalankan aksinya, produsen pabrik nakal sengaja memainkan batasan dan ketentuan penggunaan pita cukai. Mereka memasang pita cukai di bawah standar yang ditentukan.

Ia mencontohkan, rokok dengan kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang seharusnya memasang pita cukai minimum 26 persen dari harga resmi, ada yang memasang pita cukai hanya empat hingga delapan persen. Mereka memakai batasan pemasangan pita cukai untuk rokok untuk kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Muslimin menambahkan, kasus ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Karena selain merugikan pemerintah, juga mematikan industri rokok dengan kategori SKT.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan anggotanya di beberapa wilayah Indonesia, lanjut Muslimin, peredaran rokok ilegal ini hampir terjadi di seluruh Indonesia.

Ia mencatat, peredaran rokok ilegal di wilayah Medan per bulan mencapai 60 kontainer, Padang 45 kontainer, Jambi 45 kontainer, Bandarlampung 50 kontainer, Banjarmasin 45 kontainer, Samarinda 50 kontainer, Manado, Palu dan Kendari masing-masing 45 kontainer, dan Makassar 65 kontainer. "Peredaran rokok ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai 945 kontainer per bulan," kata Muslimin menegaskan.

Selain itu, Muslimin juga mempertanyakan tidak tegasnya sikap Dirjen Bea dan Cukai dalam menindak perusahaan rokok yang nakal.

Menurutnya, tindakan operasi dan penutupan terhadap perusahaan nakal tidak menyeluruh.

"Seharusnya dilakukan operasi besar-besaran dan simultan. Sehingga produsen rokok nakal bisa ditindak dan tidak ada kesan terbang pilih," katanya.

Selain itu, Dirjen Bea dan Cukai juga harus memperhitungkan kebutuhan pita cukai bagi rokok sesuai produksi yang ada. "Jumlah pabrik yang terdaftar di pemerintah sudah ada, jumlah produksi mereka juga jelas. Tetapi mengapa jumlah pita cukainya hanya sedikit? Apakah memang ada permainan agar produsen bisa menggunakan cukai palsu?," katanya.

Untuk peredaran rokok ilegal pada 2006 belum ada data resmi. Namun, jumlah industri rokok di Indonesia pada 2006 berkembang

mencapai 3.961 perusahaan rokok dengan produksi sebesar 218,72 juta batang per tahun.

Departemen Perindustrian membagi 3.961 perusahaan rokok di Indonesia tersebut dalam tiga golongan besar yang terdiri enam perusahaan dengan produksi 164,15 juta batang per tahun, golongan sedang sebanyak 25 perusahaan yang memproduksi 22,34 juta batang per tahun dan lainnya masuk dalam golongan ketiga terdiri dari A, B dan C.

Jumlah industri rokok terbesar berada di wilayah Jawa Timur (Jatim) yakni sebesar 75 persen dari populasi nasional yang tersebar di berbagai daerah seperti Pamekasan, Tulungagung, Malang, Kediri dan berbagai daerah lainnya.

Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko, mengungkapkan, setiap masukan dari masyarakat akan kita terima, selanjutnya kita pelajari dan kita tindaklanjuti.

Keseriusan jajaran Polri dalam memerangi peredaran rokok ilegal, sudah terbukti. Satuan Reskrim Ekonomi Polda Jateng, belum lama ini membongkar produk rokok tanpa cukai di Kabupaten Grobogan dan menangkap dua orang tersangka pelaku serta barang bukti sebanyak 22,5 bal rokok tersebut (satu bal berisi 20 slop).

Wadir Reskrim Polda Jateng, AKBP Zainal Paliwang, mengatakan, dua tersangka tersebut adalah Suci Rahayu, penduduk Desa Pulo Kulon Kecamatan Pulo Kulon Kabupaten Grobogan dan Mohammad Safii.

Rokok sebanyak 22,5 bal yang diproduksi mereka dengan merk Maduroso (3 bal), Rukun (3 bal), 232 (11 bal), Promild" (4 bal), Flasmild (0,5 bal), dan Juragan (17 slop). Rokok-rokok ini diduga telah beredar di Kabupaten Grobogan, Pati, dan Sragen. [AR-008]

